

SKRIPSI

**PENGARUH UPAH MINIMUM, PENGELUARAN PEMERINTAH
DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
PADA SEKTOR PERDAGANGAN MELALUI PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI KABUPATEN BONE**

**JUMRIANI
A011181014**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

SKRIPSI

PENGARUH UPAH MINIMUM, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERDAGANGAN MELALUI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI KABUPATEN BONE

Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**JUMRIANI
A011181014**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

SKRIPSI

PENGARUH UPAH MINIMUM, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERDAGANGAN MELALUI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI KABUPATEN BONE

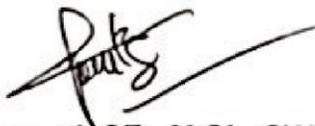
disusun dan diajukan oleh

JUMRIANI
A011181014

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 19 Desember 2023

Pembimbing I



Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19640106 198803 2 001

Pembimbing II



Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF
NIP. 19590303 198810 1 001



Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CSF., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

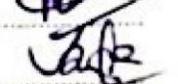
PENGARUH UPAH MINIMUM, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERDAGANGAN MELALUI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI KABUPATEN BONE

disusun dan diajukan oleh

JUMRIANI
A011181014

telah dipertahankan dalam siding ujian skripsi
pada tanggal 16 januari 2024 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji,

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fatmawati, SE., M Si., CWM®	Ketua	1. 
2.	Drs. Bakhtiar Mustari, M Si., CSF	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Madris, SE., DPS, M Si., CWM®	Anggota	3. 
4.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M Si., CSF, CWM®	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sabir, SE., M.Si., CSF., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Jumriani
NIM : A011181014
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

"Pengaruh Upah Minimum, Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan Melalui Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Bone"

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 17 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Jumriani

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa langit dan bumi beserta isinya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiap manusia yang dikehendaki-Nya.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu 'Alaihi wa Sallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia, juga kepada keluarga serta sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan seluruh pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada peneliti. Untuk itu tidaklah berlebihan jikalau peneliti mengkhususkan bagian ini hanya untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua peneliti, Bapak Muh. Nawir dan Ibu Sahara yang senantiasa memberikan segala yang dimiliki untuk anaknya selama menempuh pendidikan, baik itu dukungan materi maupun non-materi selama peneliti bersekolah hingga kuliah.
2. Suami peneliti Syahrini yang selalu menemani perjuangan menyelesaikan penelitian dan anak tercinta Nazifa Putri Syazani yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

3. Dosen pembimbing 1, yaitu Ibu Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM®, yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat yang diberikan kepada peneliti.
4. Dosen pembimbing 2, yaitu Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat yang diberikan kepada peneliti.
5. Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
6. Pihak departemen Ilmu Ekonomi yang senantiasa memberikan segala bantuan selama proses perkuliahan yang dijalani penulis dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen FEB-UH yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasehat kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin...
8. Kawan-kawan Ilmu Ekonomi 2018 (LANTERN) terima kasih atas setiap momen kebersamaan baik suka maupun duka yang telah dilewati selama masa perkuliahan..
9. Seluruh sahabat dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Makassar, 18 Januari 2024

Jumriani

ABSTRAK

PENGARUH UPAH MINIMUM, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERDAGANGAN MELALUI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI KABUPATEN BONE

**Jumriani
Bahtiar
Fatmawati**

Permasalahan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bone saat ini yaitu masih tingginya jumlah pengangguran yang belum dapat dikurangi karena jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang bekerja khususnya pada sektor perdagangan. Hal ini membawa berbagai tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan melalui PDRB di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun data yang digunakan adalah runtut waktu (Time Series) dari tahun 2013-2022. Analisis model menggunakan model regresi analisis jalur kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik dan hipotesis, dengan bantuan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan melalui PDRB, di Kabupaten Bone tahun 2013-2022

Kata Kunci: Upah minimum, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, PDRB, dan Penyerapan Tenaga Kerja.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF MINIMUM WAGES, GOVERNMENT EXPENDITURE, AND INVESTMENT ON LABOR ABSORPTION IN THE TRADE SECTOR THROUGH GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT IN BONE

**Jumriani
Bahtiar
Fatmawati**

The current problem of labor absorption in Bone Regency is that there is still a high number of unemployed which cannot be reduced because the number of the workforce is not balanced with the number of people working, especially in the trade sector. This brings various challenges for local governments in overcoming the problem of labor absorption. This research aims to determine the effect of minimum wages, investment, and government spending on labor absorption in the trade sector through GRDP in the Bone Regency. This research uses quantitative methods. The data used is a time series from 2013-2022. Model analysis used a path analysis regression model and then classical assumptions and hypotheses were tested, with the help of SPSS 26. The results of the study showed that the minimum wage, investment, and government expenditure variables had a significant influence on labor absorption in the trade sector through GRDP, in Bone Regency in 2013-2022

Keywords: Minimum wage, Investment, Government Expenditures, GRDP, and Labor Absorption.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah.....	8
1.3.Tujuan Penelitian.....	9
1.4.Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Penyerapan Tenaga Kerja	11
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto.....	12
2.1.3 Upah Minimum	13
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah	14
2.1.5 Investasi	16
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	17
2.2.1 Keterkaitan Antara PDRB Dan Penyerapan Tenaga Kerja.....	17
2.2.2 Keterkaitan Antara Upah Dan Penyerapan Tenaga Kerja.....	17
2.2.3 Keterkaitan Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Penyerapan Tenaga Kerja	18

2.2.4	Keterkaitan Antara Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja	18
2.3	Penelitian Terdahulu	19
2.4	Kerangka Pemikiran	20
2.5	Hipotesis	21
BAB III METODE PENELITIAN		23
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	23
3.2	Jenis dan Sumber Data	23
3.2.1	Jenis Data	23
3.2.2	Sumber Data	23
3.3	Metode Pengumpulan Data	24
3.4	Metode Analisis Data	24
3.4.1	Uji Asumsi Klasik	26
3.4.2	Uji Hepotesis	28
3.5	Definisi Variabel Operasional	31
3.5.1	Variabel Independen	31
3.5.2	Variabel Dependen	31
BAB IV		33
PEMBAHASAN		33
4.1	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bone	33
4.2	Gambaran Umum Variabel Penelitian	34
4.2.1	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan di Kabupaten Bone Tahun 2013-2022.	34
4.2.2	Gambaran Umum Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bone Tahun 2013-2022.	36
4.2.3	Gambaran Umum Upah Minimum Kabupaten Bone Tahun 2013-2022.	37
4.2.4	Gambaran Umum Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2013-2022.	39
4.2.5	Gambaran Umum Investasi Kabupaten Bone Tahun 2013-2022.	40
4.3	Hasil Estimasi	41
4.3.1	Uji Asumsi Klasik	42
4.3.2	Uji Hipotesis	44
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	50
4.4.1	Pengaruh Langsung	50

4.4.2 Pengaruh Tidak Langsung	58
BAB V	62
PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2.Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penduduk dan Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Bone 2013-2022.....	3
Tabel 1. Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja di Sektor Perdagangan Kabupaten Bone 2013-2022.....	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4.1 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2013-2022.....	34
Gambar 4.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bone Tahun 2013-2022.....	36
Gambar 4.3 Upah Minimum Kabupaten Bone Tahun 2013-2022.....	38
Gambar 4.4 Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2013-2022.....	40
Gambar 4.3 Investasi Kabupaten Bone Tahun 2013-2022.....	41
Gambar 4.3 Model Struktural Hasil Penelitian.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampran 1 Data Penelitian.....	67
Lampran 2 Uji Asumsi Klasik.....	68
Lampran 3 Hasil Penelitian.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Namun dalam mencapainya sering dihadapkan pada masalah-masalah pokok yaitu pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan dan ketidakseimbangan ekonomi antar daerah (Lestariningsih, 2006). Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, akan meningkatkan beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) termasuk salah satu faktor penting bagi keberhasilan terselenggaranya pembangunan nasional. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Penyediaan lapangan kerja yang besar diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Perbaikan

kualitas sumber daya manusia juga mutlak diperlukan karena merupakan modal pembangunan. Tersedianya tenaga kerja yang besar jika dimanfaatkan, dibina, dan dikerahkan untuk bisa terserap di berbagai sektor ekonomi dan menciptakan tenaga kerja yang efektif.

Penyerapan tenaga kerja juga tidak terlepas dari peranan pemerintah sebagai penyusun kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang baik, serta strategi-strategi yang dilakukan demi tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi juga sering menjadi alasan bagi pengusaha untuk lebih memilih industri yang padat modal. Stabilitas perekonomian juga diperlukan untuk menjamin perekonomian berjalan dengan lancar. Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan makro ekonomi. Dilihat dari dimensi regional beberapa permasalahan pengangguran adalah tidak adanya konvergensi dari tingkat pengangguran provinsi maupun kabupaten atau kota menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Kabupaten Bone sendiri tercatat sebagai salah satu kabupaten yang berada pada urutan kedua dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kabupaten Bone tahun 2021 sebanyak 806.750 jiwa. Berdasarkan kegiatannya, penduduk usia 15 tahun ke atas dapat dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2021, jumlah

angkatan kerja 383.962 jiwa dan bukan angkatan kerja 200.701 jiwa. Selanjutnya dari angkatan kerja tersebut terdapat penduduk bekerja sebanyak 368.032 jiwa dan pengangguran 15.930 jiwa. Data BPS Kabupaten Bone menunjukkan bahwa jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk naik sebesar 4.975 jiwa dan angkatan kerja sendiri naik sebanyak 31.956 jiwa . Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Bone untuk terus melakukan berbagai upaya dan kebijakan di berbagai sektor khususnya sektor perdagangan yang berpotensi untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas agar bisa menciptakan keseimbangan antara para pencari kerja dan kesempatan kerja. Berikut tabel kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bone

Tabel 1.1 Penduduk dan Ketenagakerjaan Kab. Bone 2013-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Angkatan Kerja	Penduduk Yang Bekerja	Pengangguran
2013	310.636	322.922	310.636	12.286
2014	322.593	339.427	322.593	16.834
2015	536.636	347.928	332.756	15.172
2016	750.973	330.749	312.656	15.098
2017	751.026	327.278	302.832	14.446
2018	754.394	316.146	307.234	8.912
2019	806.889	332.903	322.096	10.807
2020	801.775	352.006	340.746	11.26
2021	806.75	383.962	368.032	15.93
2022	813.188	396.895	387.876	9.019

Sumber: Data BPS, Diolah

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 berisi data tentang kondisi perkembangan ketenagakerjaan secara umum Kabupaten Bone tahun 2017-2022. Pada tahun 2017 penduduk yang bekerja mencapai 302.832 jiwa sedangkan angkatan kerja sebesar 327.278 jiwa. Jumlah angkatan

kerja terus mengalami peningkatan tiap tahunnya disusul jumlah penduduk yang bekerja yang terus berada di bawah jumlah angkatan kerja. Sedangkan untuk jumlah pengangguran tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 8.912 jiwa tetapi pada tahun 2019-2021 terus meningkat sebesar 15.930 jiwa dan menurun kembali di tahun 2022 menjadi 9.119. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan di Kabupaten Bone mulai teratasi di tahun 2022 tetapi masih terdapat angka pengangguran yang lebih banyak dari tahun 2018. Hal ini terlihat pada angka penduduk bekerja masih di bawah angka jumlah angkatan kerja atau peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang baik sehingga menyebabkan tingkat pengangguran yang juga ikut meningkat.

Bergeraknya aktivitas perekonomian di berbagai sektor di Kabupaten Bone seharusnya juga diikuti oleh kemampuan masing-masing sektor untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja Kabupaten Bone. Maka dalam mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan diperlukan adanya sektor-sektor unggulan untuk menyerap tenaga kerja (Yuniarto, 2015). Salah satunya adalah sektor perdagangan.

Sektor perdagangan dianggap sebagai perintis dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Sektor perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam hal keberhasilan sebuah pembangunan. Dengan adanya pembangunan sektor perdagangan maka

diharapkan akan dapat memicu sektor lainnya seperti pertanian dan sektor industri. Keadaan tersebut mendorong adanya perluasan peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Komposisi tenaga kerja menggambarkan perbandingan jumlah tenaga kerja di suatu sektor tertentu terhadap seluruh tenaga kerja. Kabupaten Bone salah satu daerah yang selain mengandalkan hasil pertanian, juga sangat mengandalkan hasil perdagangannya. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan di Kabupaten Bone ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Penduduk Kabupaten Bone Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Perdagangan Tahun 2013-2022 (jiwa/orang)

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja
2013	34.338
2014	34.470
2015	34.748
2016	35.248
2017	36.838
2018	38.488
2019	44.048
2020	42.738
2021	40.176
2022	37.061

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone

Pada Tabel 1.2 menunjukkan jumlah tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Bone pada tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan ybermulai dari 36.838 menjadi 44.048 jiwa, akan tetapi pada tahun 2020-2022 jumlah tenaga kerja mengalami penurunan. Adapun

jumlah tenaga kerja sampai tahun 2020 -2022 adalah 42.738 menajadi 40.176 dan 37.061 jiwa. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Bone cenderung meningkat. Akan tetapi jumlah penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja sektor sektor pertanian dan sektor industri. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone pada tahun 2021 didominasi oleh sektor pertanian dan sektor industry.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Upah yang ditetapkan pada suatu wilayah akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain akan mempengaruhi pengangguran di wilayah tersebut. Upah minimum dapat meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja, di mana pengusaha individu memiliki tingkat kekuasaan penetapan upah atas pasar secara keseluruhan. Upah minimum meningkatkan kelayakan hidup para pekerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, mengurangi ketidaksamaan, dan meningkatkan moral.

Indikator perekonomian suatu wilayah dilihat dari tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2010). PDRB dapat mempengaruhi jumlah

angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau produksi dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat.

Tenaga kerja pada berbagai dimensinya masih menjadi suatu beban persoalan dalam sistem perekonomian. Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian Indonesia dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan belanja pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Pengeluaran pemerintah merupakan suatu cara untuk menggerakkan permintaan yang dapat memompa suatu perekonomian yang sedang tertekan dan memulihkan tingkat kesempatan kerja yang tinggi (Heilbroner, 1982). Melalui pengeluaran pemerintah dapat memperbesar output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu juga dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena pengeluaran pemerintah akan menjadi sumber penerimaan masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat.

Hal yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah di Kabupaten Bone. Namun, sampai saat ini pembangunan ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat krusial. Ada beberapa faktor yang secara simultan dan kompleks saling berpengaruh di dalamnya, sehingga penelitian ini masih menarik untuk diteliti. Fakta bahwa tingkat pengangguran yang cukup tinggi di

Kabupaten Bone terjadi karena jumlah penduduk meningkat tiap tahunnya, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja masih di bawah jumlah angkatan kerja sehingga menimbulkan penyerapan tenaga kerja yang belum optimal. Dengan adanya peningkatan PDRB, upah minimum dan pengeluaran pemerintah harusnya dapat menjawab permasalahan penyerapan tenaga kerja yang belum optimal.

Variabel lain yang juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan berbagai perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2012). Dengan begitu, adanya investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009).

Berdasarkan latar belakang di atas , maka penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat melihat pengaruh dari PDRB, Upah Minimum, Pengeluaran Pemerintah, dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Bone.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang ada, maka yang akan menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah Upah Minimum Berpengaruh Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan Baik Secara Langsung Maupun Secara Tidak Langsung Melalui PDRB?
2. Apakah Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan Baik Secara Langsung Maupun Secara Tidak Langsung Melalui PDRB?
3. Apakah Investasi Berpengaruh Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan Baik Secara Langsung Maupun Secara Tidak Langsung Melalui PDRB?
4. Apakah PDRB Berpengaruh Langsung Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Apakah Upah Minimum Berpengaruh Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan Baik Secara Langsung Maupun Secara Tidak Langsung Melalui PDRB?
2. Untuk Mengetahui Apakah Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan Baik Secara Langsung Maupun Secara Tidak Langsung Melalui PDRB?

3. Untuk Mengetahui Apakah Investasi Berpengaruh Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan Baik Secara Langsung Maupun Secara Tidak Langsung Melalui PDRB?
4. Untuk Mengetahui Apakah PDRB Berpengaruh Langsung Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat penting dalam pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan Kabupaten Bone, berkontribusi pada literatur ekonomi dan pengembangan kebijakan. Hasilnya akan memberikan wawasan bagi pemerintah dalam perencanaan kebijakan ekonomi, dan memberikan dasar untuk perbaikan kualitas hidup pekerja serta pemberdayaan tenaga kerja. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran kebijakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya relevan dan bermanfaat dalam konteks lokal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah teori yang memiliki keterkaitan lebih jelas lagi, landasan teori merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis (Sugiyono). Dengan demikian, pada bagian ini dicantumkan berbagai konsep-konsep dan definisi yang relevan dengan topik penelitian.

2.1.1 Penyerapan Tenaga Kerja

Rahardjo (1984), mendefinisikan penyerapan tenaga kerja sebagai jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu sektor dalam waktu tertentu. Menurut Kuncoro (2002), Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar diberbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja secara umum menunjukkan besarnya kemampuan suatu perusahaan menyerap sejumlah tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk

menyerap tenaga kerja besarnya tidak sama antara sektor satu dengan sektor yang lain (Sony Sumarsono, 2003).

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total daerah atas output barang dan jasa. PDRB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam satuan nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu (Mankiw, 2007). Menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sedangkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diestimasi dengan tiga pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah, pada suatu periode tertentu (1 tahun).

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir disuatu wilayah, dalam jangka waktu tertentu (1 tahun).

c. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Menurut pendekatan pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (1 tahun).

Tingkat pengangguran berbanding terbalik dengan output selama siklus bisnis. PDB riil harus tumbuh secepat PDB potensial untuk menjaga agar tingkat pengangguran tidak meningkat. PDB harus tetap melaju untuk menjaga tingkat pengangguran stabil. Jika pengangguran ingin diturunkan, PDB sebenarnya harus tumbuh lebih cepat dari PDB potensial (Mankiw, 2007). Dengan kata lain, dengan meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan jumlah yang bekerja oleh karena itu hubungan antara jumlah output dengan penyerapan tenaga kerja adalah apabila terjadi kenaikan permintaan output yang dihasilkan suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung akan meningkatkan jumlah tenaganya untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang ada (Wicaksono, 2010).

2.1.3 Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi/Bupati/Walikota), dan setiap tahun berubah. Tujuan utama dari kebijakan upah minimum adalah untuk melindungi

pekerja dari rendahnya tingkat upah, terutama pada saat tingkat penawaran tenaga kerja yang tinggi sehingga tingkat upah tidak akan terus mengalami penurunan.

Teori Neo Klasik menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah disini berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut terhadap pengusaha. Upah dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja (produktivitas) yang diberikan oleh tenaga kerja, dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori Neo Klasik didasarkan pada nilai pertambahan hasil faktor produksi. Dimana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari karyawannya. Teori upah menurut Karl Marx, sistem pengupahan di suatu negara didasarkan pada filsafah atau sistem perekonomian tersebut.

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan belanja pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja (Sukirno,2000).

Kebijakan fiskal melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran agregat. Langkah tersebut akan menaikkan PDRB dan tingkat penggunaan tenaga kerja, sebagaimana yang tertera pada persamaan PDRB dengan pendekatan pengeluaran. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan ini akan menambah kesempatan kerja.

Akibat pengeluaran pemerintah meningkat, pengeluaran yang direncanakan juga mengalami peningkatan. Namun, ada keterbatasan barang dan jasa yang terproduksi. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan output agar produknya dapat sesuai untuk memenuhi rencana pengeluaran. Untuk meningkatkan output, perusahaan akan membutuhkan pekerja lebih banyak sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran (Mankiw, 2003).

Pengeluaran pemerintah versi Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Pengeluaran pemerintah (government expenditure) meliputi pengeluaran untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2006), yaitu kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Salah satu fungsi pokok kebijakan anggaran belanja negara adalah fungsi stabilisasi. Termasuk ke dalam fungsi

stabilisasi ialah tujuan untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai (Reksoprayitno, 2009).

2.1.5 Investasi

Investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Unit yang diinvestasikan mencakup waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian masa mendatang (Lypsey,1997).

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat (Sukirno,2000). Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, maka negara diwajibkan untuk menjamin ketersediaan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Pada dasarnya jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan menggulirkan program-program investasi yang padat karya yang secara langsung dapat menyerap tenaga kerja. Bukan lebih berpihak pada pengembangan investasi di sektor (jasa) yang padat modal dan minim

tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi yang seharusnya diikuti dengan menurunnya pengangguran tidak terjadi.

2.2 Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar variabel adalah hubungan antara variabel yang diteliti yaitu variabel bebas, variabel terikat dan terkadang ada variabel mediasi. Yang mana anatar variabel saling berkaitan yang dapat saling berpengaruh, berhubungan atau sebagai perantara. Hubungan antar variabel dapat bersifat simetris atau tidak ada yang berhubungan dan berpengaruh, hubungan timbal balik yang menjadi sebab & akibat dan hubungan asimetris yang mana hanya ada satu yang berhubungan atau menunjukkan respon tertentu dalam situasi tertentu.

2.2.1 Keterkaitan Antara PDRB Dan Penyerapan Tenaga Kerja

Peningkatan jumlah PDRB akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Begitu juga sebaliknya penurunan jumlah PDRB akan berpengaruh pada penurunan penyerapan tenaga kerja. Teori lain dimana menurut Keynes dalam Boediono (1992) bahwa pasar tenaga kerja hanyalah mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Apabila output yang diproduksi naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan juga naik hal ini dapat dikaitkan dengan konsep fungsi produksi, yang menyatakan bahwa kenaikan output hanya dapat tercapai apabila input (tenaga kerja) ditingkatkan penggunaannya.

2.2.2 Keterkaitan Antara Upah Dan Penyerapan Tenaga Kerja

Kenaikan upah akan mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja. Dengan adanya penetapan tingkat upah yang dilakukan oleh

pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan dampak terhadap besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang ada. Keseimbangan antara besarnya upah dan jumlah tenaga kerja tercapai saat upah minimum meningkat maka mendorong para pekerja untuk bekerja sesuai dengan tawaran waktu yang diberikan oleh sebuah perusahaan.

2.2.3 Keterkaitan Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Penyerapan Tenaga Kerja

Kenaikan pengeluaran pemerintah dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu, juga dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena pengeluaran pemerintah akan menjadi penerimaan agregat. Karena adanya kenaikan permintaan agregat sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan output produksinya. Untuk itu, produsen memerlukan tambahan input produksi salah satunya adalah tenaga kerja, sehingga akan tercipta kesempatan kerja baru. Dengan demikian, kenaikan pengeluaran pemerintah akan menambah kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah seperti membangun jalan, sekolah, atau fasilitas lain umumnya bersifat padat karya sehingga dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja.

2.2.4 Keterkaitan Antara Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Secara teoritis, semakin besar nilai investasi yang dilakukan maka semakin besar pula tambahan penggunaan tenaga kerja. Perekonomian selalu berusaha mencapai kondisi optimal maka penambahan penggunaan *capital* melalui kegiatan investasi, yang berarti meningkatnya kapasitas

produksi itu, akan meningkatkan pula pengguna tenaga kerja yang selanjutnya secara bersama-sama menaikkan tingkat output maksimum yang mungkin dicapai.

Dengan adanya peningkatan investasi pada suatu perusahaan, juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada perusahaan tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan akan meningkatkan jumlah output yang akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2.3 Penelitian Terdahulu

Riky Eka Putra (2012), membahas tentang “Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang” Adapun hasil penelitiannya yaitu, bahwa secara parsial maupun simultan variabel nilai investasi, nilai upah, dan nilai produksi berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Richat Tri Laksono (2016), membahas tentang “Efektifitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember” Adapun hasil penelitiannya yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember.

Ziyadaturrofiqoh (2018), membahas tentang “Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi”. Adapun hasil penelitiannya yaitu secara simultan variabel PDRB, upah minimum provinsi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

Pratama, B. A., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Pengaruh PDRB, Tingkat Upah Minimum dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo. Adapun hasil penelitiannya yaitu PDRB dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo.

Felber Lube, Josep Bintang Kalangi, Krest D. Tolosang (2021), membahas tentang “Pengaruh Upah Minimum dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bitung”. Adapun hasil penelitiannya yaitu, variabel upah minimum kota memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan produk domestik regional bruto tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bitung.

2.4 Kerangka Pemikiran

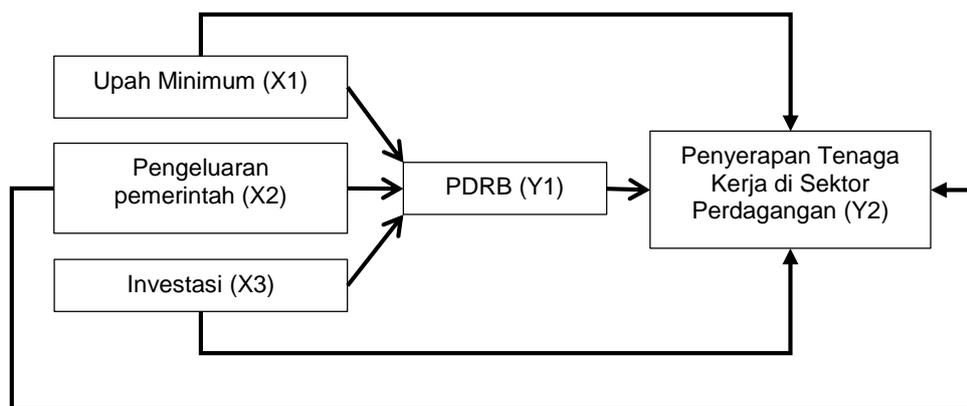
Kerangka pemikiran dalam penelitian “Pengaruh PDRB, upah minimum, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap penyerapan

tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Bone” dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya PDRB, upah minimum dan pengeluaran pemerintah. Variabel-variabel tersebut akan lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang sebelumnya sudah dipaparkan.

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, Gambar 2.1 dibawah adalah kerangka pikir yang berfungsi sebagai acuan untuk mencerminkan pola pikir yang digunakan dan perumusan hipotesis.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis



Hipotesis adalah jawaban yang mempunyai sifat sementara terhadap masalah pada penelitian hingga terbukti akurat melalui data yang sudah terkumpul dan diolah. Hipotesis juga merupakan dugaan – dugaan benar atau salah. Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan teori yang relevan ataupun hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh antara upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui PDRB.
2. Terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui PDRB.
3. Terdapat pengaruh antara investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui PDRB.
4. Terdapat pengaruh antara PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan.